



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125/KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA



KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dengan Undang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bentuk a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tetram serta dapat memperlancar penyelesaian pembinaan dan pengawasan administrasi persekolah, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengembalikan Sekolah Dasar "Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEHUTUSKAN

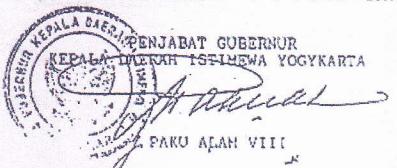
Ditetapkan :

Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersbut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertantangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 . APRIL - 1991



C. KARUPATEN DATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P DIKTI KECAMATAN TEMEN

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR RUMAH
1.	SD NEGERI PLUMEON I	1.	SD MULYAWADI KEDUNGJAYA
2.	SD NEGERI PLUMEON II	2.	SD MULYAWADI KEDUNGJAYA
3.	SD NEGERI KEDUNDUNG	3.	SD PERAK TENG
4.	SD NEGERI DEMEN	4.	SD MULYAWADI KEDUNGJAYA
5.	SD NEGERI KLLUR	5.	SD BUPRI BULAWAYA
6.	SD NEGERI KALIGINTUNG	6.	SD BUPRI BULAWAYA
7.	SD NEGERI KALISARI		
8.	SD NEGERI TEMON		
9.	SD NEGERI NEONREJO		
10.	SD NEGERI JANTEN		
11.	SD NEGERI SIDUTAN		
12.	SD NEGERI JANGKARAN		
13.	SD NEGERI PASIR MENDIT		
14.	SD NEGERI GLAGAH I		
15.	SD NEGERI GLAGAH II		
16.	SD NEGERI PLUMEON III		
17.	SD NEGERI PALIHAN LDR		
18.	SD NEGERI GLAGAH III		
19.	SD NEGERI TEMON KLLON		
20.	SD NEGERI TRUKAN		
21.	SD NEGERI KARANGJULLH		
22.	SD NEGERI KLLUR KLLON		
23.	SD NEGERI PANGINAN		
24.	SD NEGERI NGENTAK		

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataleksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepgawainan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perswatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Waktu diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

